

Judul : Jaga ketahanan energi ya biar tak seperti Srilangka, neraca perdagangan jangan sampai minus
Tanggal : Selasa, 06 September 2022
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Neraca Perdagangan Jangan Sampai Minus

Jaga Ketahanan Energi Ya Biar Tak Seperti Sri Lanka

Senayan mengingatkan Pemerintah menjaga ketahanan pangan dan energi, agar tak berakhir seperti Sri Lanka sebagai negara bangkrut. Apalagi, kondisi impor Indonesia saat ini masih tinggi.

ANGGOTA Komisi VII DPR Gde Sumarjaya Linggih mengatakan, pangan dan energi kita masih banyak yang impor. Kondisi ini berpotensi memburuk.

"Kedua hal itu akan menjadi substansi pokok ke depan," ujar pria yang akrab disapa Demer ini, kemarin.

Politikus Golkar ini mengungkapkan, banyak negara yang jatuh berawal dari ketahanan energinya yang lemah. Hal itu diperpa-

rah dengan pandemi Covid-19 yang tak berkesudahan. Disusul perang Rusia dan Ukraina yang menyebabkan ketahanan energi negara beberapa negara berkurang.

Demer mengatakan, energi sangat mahal. Dalam kasus Sri Lanka, ekspor neraca perdagangan minus dan tidak bisa pinjam dana ke mana-mana. Akhirnya, negara tidak bisa impor energi dan pemerintahan runtuh.

Demer memaparkan sejumlah alasan mengapa sektor pangan dan energi menjadi hal pokok agar tak terjerumus masuk menjadi negara bangkrut seperti Sri Lanka.

"Begitu perekonomian jatuh, maka pemerintahan biasanya ikut jatuh, baik itu negara demokratis maupun negara otokratis," kata dia.

Kejadian di Sri Lanka, lanjutnya, harga sepeda tiba-tiba naik lima kali lipat karena sudah nggak bisa pakai mobil, lantaran tidak bisa impor minyak.

"Negaranya juga sudah nggak bisa pinjam uang ke mana-mana, sehingga nggak bisa beli energi

atau bahan bakar," terangnya.

Untuk itu, Demer menyarankan Pemerintah terus berupaya menggenjot perdagangan ke arah surplus. Perkuat ketahanan energi dan pangan melalui badan-badan yang sudah didirikan. Seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Badan Standardisasi Nasional (BSN), Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS), dan Badan Pengusahaan (BP) Batam.

"Tujuan sebenarnya badan-badan itu dibentuk untuk membuat perdagangan surplus. Dengan itu, kita masih dipercaya banyak negara," harap dia.

Anggota Komisi VII Sartono

Hutomo menambahkan, kenaikan harga BBM akan berdampak signifikan terhadap daya beli masyarakat. Tingkat inflasi akan naik dan harga bahan pangan akan meroket.

"Kenaikan harga Peralite dan Solar akan mempengaruhi masyarakat, termasuk kelas menengah karena mereka akan mulai menahan belanjanya," kata Sartono.

Sartono bilang, masyarakat yang menahan belanja akan berimbas pada permintaan industri manufaktur yang berpotensi terpukul. Serapan tenaga kerja juga akan terganggu, sehingga target Pemerintah memulihkan ekonomi malah tidak tercapai. ■ TIF